

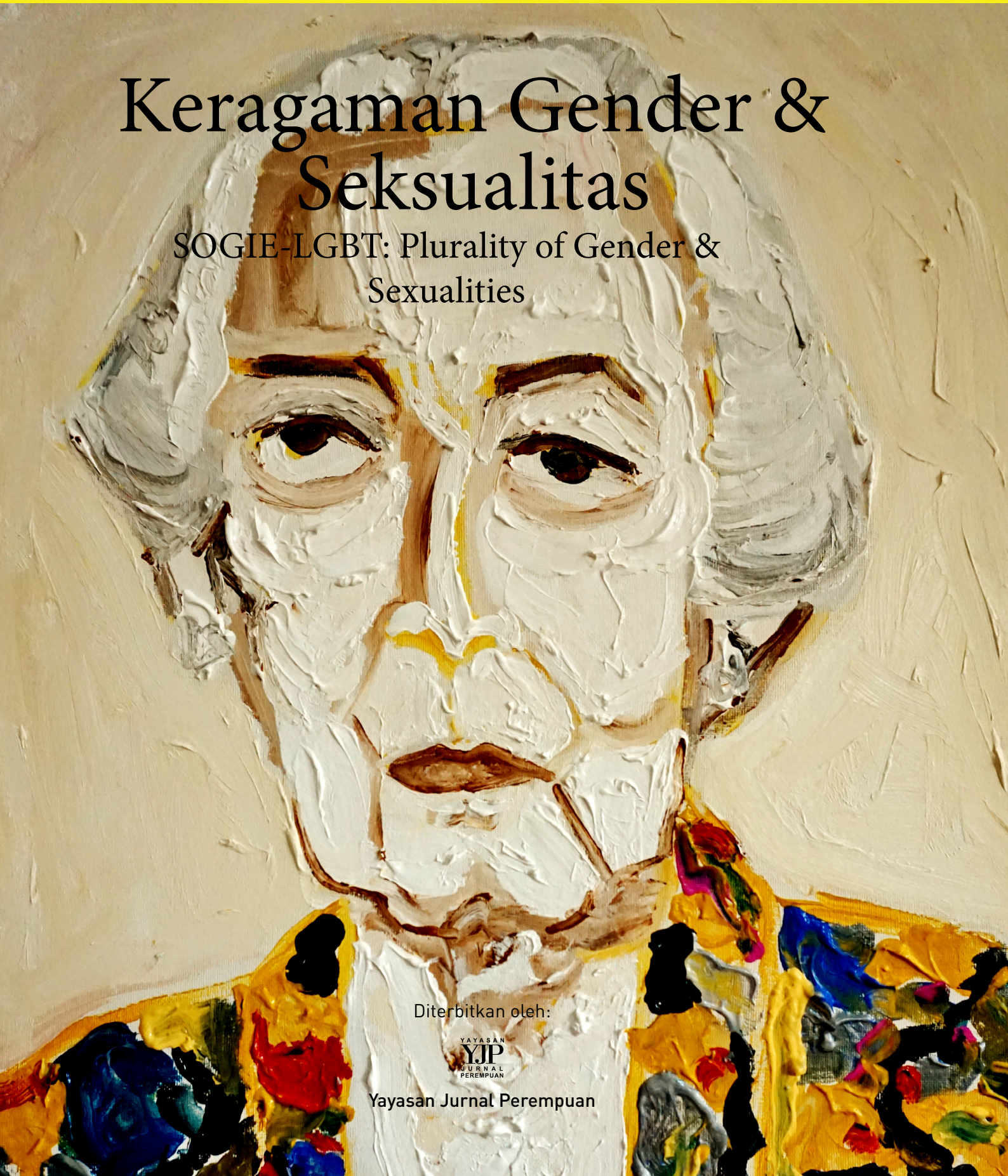
Keragaman Gender & Seksualitas

SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &
Sexualities

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

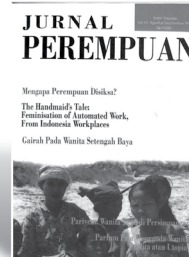
Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

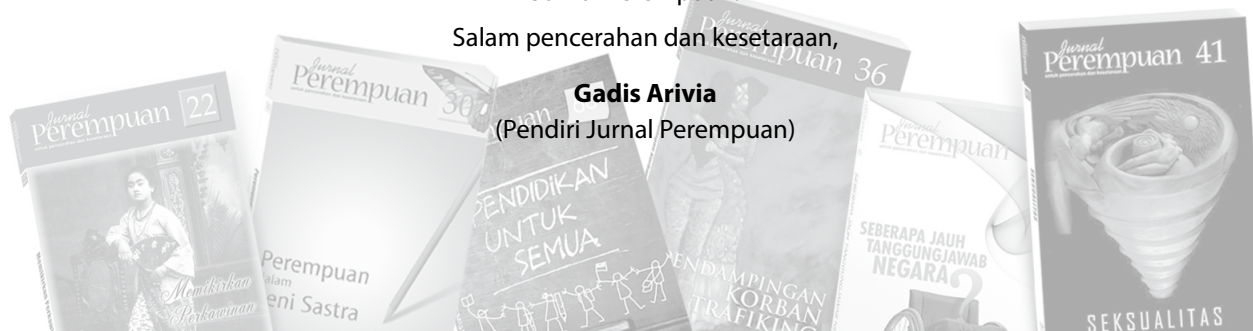
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2015



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta.....	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	383-385
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihwal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang janggal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.
ardhanaryinstitute.org

Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.

Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju "diri", FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia
www.suarakita.org

"Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar "Why I founded Our Voice": a Memoir

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia

Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia

Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer

Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti lainnya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana
Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD
Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1

LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl

LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulama did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terganggu, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya meleraikan ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :
+62.21.7270038

**“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian
Queer di Jakarta**

**“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer
Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar,
9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state, and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearths LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.

“Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?” Sebuah Memoar

“Why I founded Our Voice”: a Memoir

Hartoyo

Pendiri dan Ketua Suara Kita
& Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia. www.suarakita.org

hartoyomdn@gmail.com

Naskah Diterima 7 September 2015. Direvisi 28 September 2015. Disetujui: 12 Oktober 2015

Abstract

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Abstrak

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarkan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Pendahuluan

Tak terbayangkan sebelumnya untuk menjadi seorang aktivis hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, jika kejadian penyiksaan di salah satu kantor Polisi Aceh pada malam 21 dan 22 Januari 2007 tak pernah terjadi dalam hidupku. Berkat bantuan aktivis perempuan di Aceh dan Jakarta mengantarkan saya pada satu putusan untuk memilih menyerahkan seluruh hidup bagi perjuangan hak-hak LGBT Indonesia.¹ *“Hartoyo, kamu harus bangun organisasi LGBT untuk membantu kawan-kawanmu, agar apa yang kamu alami tidak terulang lagi pada LGBT yang lain di Indonesia”*. Begitu nasihat salah seorang aktivis perempuan kepadaku.² Putusan untuk menjadi aktivis LGBT di Indonesia memang bukan hal yang mudah, karena secara sendirinya harus terbuka pada publik identitas seksual diri sendiri dan juga harus meninggalkan bidang

pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini saya geluti. Ada banyak konsekuensi yang harus saya hadapi, selain stigma sebagai aktivis LGBT dan juga harus membangun dari kecil sebuah organisasi. Pengalaman yang belum pernah saya alami. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara menjadi aktivis di bidang pemberdayaan petani miskin dengan pemberdayaan kelompok LGBT. Kalau yang pertama tak ada stigma moral dilekatkan pada diriku bahkan dianggap *“hero”* bagi petani, tetapi menjadi aktivis LGBT stigma moral langsung dilekatkan pada diri dari apa yang saya lakukan. Tak jarang kawan-kawan sebelumnya ada yang meninggalkan bahkan *“mendingkan”* seolah-olah tak pernah kenal dengan diriku. Tetapi ada banyak kawan baru yang memberikan dukungan pada kerja yang saya lakukan sekarang, terutama kelompok gerakan perempuan dan akademisi.

Suara Kita

Suara Kita, sebagai salah satu organisasi LGBT yang mendasari berdiri karena pengalaman personalku, tetapi bukan itu saja ada hal lain yang memengaruhinya. Karena ide mendirikan organisasi Suara Kita diinisiasi oleh empat orang gay lainnya. Tetapi kelimanya sepakat bagaimana membangun kesadaran kritis pada kelompok LGBT dan publik atas hak warga negara terutama bagi kelompok LGBT. Alasan dasar itulah mengapa Suara Kita akhirnya ada dan terus berkembang sampai sekarang ini. Fokus kerjanya melalui pengembangan media alternatif dan dekonstruksi wacana seksualitas bagi publik.³ Tanggal 30 September 2009, Suara Kita resmi didaftarkan secara formal ke akta notaris dengan nama sebelumnya Lembaga Our Voice. Tetapi Suara Kita sendiri sudah didiskusikan sejak tahun 2008 bersama kawan-kawan gay di Jakarta. Pasca saya hijrah ke Jakarta di tahun 2007, disitulah saya langsung bersentuhan dengan aktivis dan organisasi LGBT di Jakarta. Awalnya sempat memberikan banyak harapan pada individu dan organisasi itu, tetapi selama proses berjalan dan berkenalan lebih dalam, ternyata ada banyak perbedaan pandangan, strategi maupun nilai yang dibangun. Sampai akhirnya berkenalan dengan empat orang gay yang punya tujuan yang sama. Tetapi waktu berjalan, dari lima orang yang membangun Lembaga Our Voice, juga ada banyak benturan soal nilai-nilai fundamental terhadap sebuah gerakan sosial. Sampai sekarang akhirnya hanya dua orang yang tetap menjaga Suara Kita, penulis dan Harry Kurniawan (anggota PKBI).

Mengapa saya melalui Suara Kita harus berjuang? Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar tetapi dapat menjalankan demokrasi, ada peluang besar bagi setiap kelompok khususnya LGBT untuk dapat bertarung dalam ruang politik, baik formal (parpol) maupun non formal (relasi hubungan sehari-hari). Tetapi pada sisi lain, walau demokrasi berjalan, tetapi masih banyak LGBT yang hidup dalam ketakutan sebagai manusia, ada stigma berdosa dan bersalah sebagai individu, maka akhirnya memilih untuk diam dan menutup diri. Kalaupun harus terbuka, hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Biasanya untuk terbuka dengan keluarga dan teman kerja hal yang sangat dihindari bagi kelompok LGBT khususnya gay dan lesbian. Kelompok tersebut lebih memilih untuk "diam" atau memainkan peran sebagai laki-laki ataupun perempuan heteroseksual. Karena inilah cara yang paling aman untuk tetap bisa

bertahan hidup ataupun bersosialisasi pada keluarga, lingkungan kerja ataupun lingkungan sosial yang lebih luas. Dan yang penting untuk tetap bisa dihargai sebagai manusia. Bahkan tak jarang dari mereka memutuskan menikah secara heteroseksual dengan berbagai alasan, agar diklaim oleh publik sebagai manusia yang "normal".

Individu gay, biseksual ataupun lesbian tentu masih bisa berupaya bernegosiasi dengan masyarakat dan keluarga untuk bisa diterima sebagai bagian dari kelompok tersebut. Bagaimana dengan kelompok transgender, khususnya yang laki-laki ke perempuan atau biasanya disebut sebagai waria. Kelompok waria karena secara penampilan terlihat oleh publik, maka diskriminasi dan kekerasan terjadi dari mulai teman bermain, sekolah, tokoh agama sampai anggota rumah tangga. Tempat yang mestinya menjadi paling aman bagi setiap orang (sekolah dan rumah) telah menjadi lembaga yang secara sistematis melakukan kekerasan bagi LGBT. Itulah mengapa individu-individu waria lebih memilih meninggalkan rumah dan sekolah untuk mengeksistensikan dirinya sebagai waria ataupun "perempuan". Karena tak cukup keterampilan untuk keluar dari rumah, maka tak ada pilihan selain menjadi prostitusi. Tentu apa yang dilakukan oleh keluarga dan sekolah karena telah terjadi kepanikan moral. Seorang anak berpenis yang semestinya bersikap maskulin tetapi memainkan peran sangat feminin, berlipstik bahkan sampai menyatakan dirinya sebagai perempuan yang mencintai laki-laki. Dalam konteks ini tentu keluarga dan lembaga pendidikan menjadi sangat marah, karena anak tersebut telah menghancurkan "martabat" kemaskulinan yang dilekatkan setiap tubuh yang bernama "penis".

Tindakan anak berpenis yang feminin itu, bukan hanya menghancurkan nama baik keluarga, sekolah, nilai masyarakat tetapi juga menggugat keyakinan terhadap agama (suci). Mungkin dapat dikategorikan sebagai "gugatan" terhadap keberagaman dan kebertuhanan yang diyakini oleh masyarakat setempat. Maka tak ada lain selain harus diberantas dan disingkirkan. Itulah kekerasan real dan nyata yang setiap detik harus dihadapi secara nyata pada kelompok waria di Indonesia. Sedangkan pada kelompok lain seperti kelompok gay, lesbian transmen ataupun priaawan masih bisa "bernegosiasi" dengan situasinya. Walau dalam konteks transmen dan priaawan tentunya ada diskriminasi yang khas yang dialami oleh mereka. Persoalan-persoalan itulah

yang semakin memperkuat Suara Kita sebagai organisasi untuk terus memperjuangkan hak-hak LGBT di Indonesia, melalui media dan pengembangan wacana seksualitas.

Politik Gender Dan Seksualitas

Penulis berpikir penting memaparkan posisi diri sebagai gay dan aktivis LGBT dalam melihat isu hak-hak LGBT sebagai identitas warga negara. Walau mungkin sudah banyak dibahas hal-hal mendasar tentang pengertian LGBT sendiri dan justifikasinya mengapa LGBT mesti dihargai dan dihormati. Tetapi kali ini saya mau memaparkan posisi politik saya dalam melihat identitas LGBT. Suara Kita sebagai organisasi fokusnya untuk hak perjuangan manusia, artinya tujuan besar yang ingin dicapai untuk menghormati dan menghargai setiap manusia dan warga negara dengan kekhasannya. Sehingga LGBT sebagai identitas hanya "pintu masuk" untuk membahas bahwa identitas gender dan seksualitas manusia itu sangat beragam yang sangat tak bisa ditentukan dengan kaku. Penulis berposisi bahwa ketika Suara Kita sedang memperjuangkan hak-hak LGBT, sebenarnya Suara Kita sedang memperjuangkan identitas seksual dan gender setiap manusia yang beragam, termasuk juga identitas laki-laki, perempuan maupun orientasi seksual heteroseksual. Artinya setiap manusia semestinya harus dilindungi, dihargai dan dihormati sebagai manusia dengan latar belakang identitas seksual dan gender apapun. Yang penting individu itu tak melakukan tindakan seksual dan ekspresi gender yang eksploitatif dan kekerasan pada pihak lain.

Sehingga menurut penulis, menjadi sangat tidak relevan mencari-cari argumentasi teks untuk menjelaskan identitas LGBT satu persatu, baik dari latar belakangnya, penyebabnya dengan menggunakan justifikasi teks agama ataupun justifikasi keilmuan medis. Karena justifikasi teks, merupakan perebutan ruang kuasa dalam pengetahuan, seperti yang sekarang banyak dilakukan untuk menjawab, mengapa kamu menjadi LGBT? Menurut penulis, persoalannya bukan mengapa seseorang menjadi LGBT, tetapi bagaimana negara melindungi dan menghormati setiap identitas seksual dan gender seseorang dengan latar belakang apapun. Karena jika kita bertanya dan akan mencari tahu penyebab seseorang menjadi LGBT, semestinya juga diperlakukan pada kelompok heteroseksual, laki-laki ataupun perempuan. Mengapa orang

menjadi heteroseksual?

Ini menunjukkan bahwa identitas seksual selain heteroseksual dan identitas gender selain laki-laki dan perempuan diposisikan lebih rendah, amoral ataupun penyimpangan seksual. Padahal penempatan posisi tersebut sangat dipengaruhi oleh ruang kuasa dan massa politik mayoritas dalam sebuah masyarakat yang berpolitis. Sehingga perebutan ruang kuasa di semua aspek kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi itulah yang diperjuangkan oleh organisasi Suara Kita. Bukan sedang mencari justifikasi apakah LGBT berdosa-tidak berdosa, LGBT genetis atau tidak genetis, LGBT penyakit atau bukan penyakit, poin perjuangannya bukan disana. Tapi penerimaan secara utuh manusia dengan identitas gender dan seksual beragam tanpa mengharuskan justifikasi medis ataupun agama.

Itulah posisi politis penulis, seksualitas dan identitas manusia tak hanya dipengaruhi oleh internal individu (biologis) saja tetapi juga faktor eksternal dari individu tersebut, yang banyak kejadian faktor eksternal itu di luar kontrol si individu sendiri. Sehingga penulis meyakini bahwa seksualitas manusia sesuatu yang cair, sangat dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti biologis, ekonomi, sosial, budaya maupun politik baik dari individu sendiri maupun dari lingkungannya. Kedinamisan dan kecairannya itulah yang harus dihargai, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah untuk setiap manusia dan warga negaranya. Dalam hal ini, penulis sangat mengkritik cara pandang bahwa seksualitas dan identitas manusia sangat kaku (biologis *an sich*) yang ada sejak lahir dan akan selalu tetap sampai si individu akan mati. Padahal tak ada identitas yang permanen pada setiap manusia, termasuk identitas seksual dan gender.

Bagaimana Suara Kita Bersuara?

Amerika di tahun 2015 telah mengesahkan untuk seluruh negara bagiannya pernikahan sejenis, saat presidennya dipimpin oleh seseorang berkulit hitam. Apa yang terjadi di Amerika sekarang, mungkin tak pernah terpikirkan oleh banyak orang Amerika, 50 atau 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang, homoseksual dapat melangsungkan perkawinan dan presidennya dari ras kulit hitam. Tahun 60-an homoseksual dan kulit hitam masih diperlakukan subordinat sebagai warga negara. Bahkan dianggap manusia tak sempurna maka layak diperbudak khusus bagi kelompok kulit hitam.⁴ Berjalannya waktu dan

gerakan perlawanan, pendidikan publik, di tahun 2015 semuanya berubah. Homoseksual dan ras kulit hitam diperlakukan setara dan adil dalam formal hukum Amerika. Walau tentu secara sosial tentunya masih banyak individu masyarakat yang masih sangat homofobia dan bertindak rasis. Tapi jumlahnya semakin kecil dalam konteks sosial masyarakat Amerika. Fakta ini ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi di Amerika sekarang, tidak datang tiba-tiba. Bukan sesuatu yang mudah untuk didapat, butuh perjuangan panjang, darah, air mata sehingga setiap LGBT dan kulit hitam dapat merasakan apa yang dirasakan sekarang ini. Situasinya mungkin bisa dikatakan sama di Indonesia, kehidupan kelompok LGBT sekarang ini (tahun 2015) mungkin hampir sama nasibnya dengan kelompok LGBT di Amerika pada tahun 60-an. Jika tidak dikatakan Indonesia jauh lebih mundur, jika di Amerika membutuhkan 60 tahunan kelompok LGBT berjuang di Amerika mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Kelompok LGBT di Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu, tapi penulis berharap akan bisa lebih cepat perubahan dibandingkan dengan Amerika.

Pasca 98, organisasi LGBT di Indonesia mulai berani menunjukkan identitasnya ke publik. Diskusi-diskusi wacana seksualitas dan gender mulai dibahas secara serius oleh beberapa organisasi sosial. Bahkan kelompok LGBT sudah dapat berdialog secara intensif berkomunikasi dengan kelompok-kelompok agama. Misalnya yang dilakukan oleh pesantren waria Al Fatah, Yogyakarta yang bekerjasama secara formal kepada Universitas Islam NU-Jepara, sebuah universitas terbesar di kota Jepara Jawa Tengah. Sehari-hari pesantren waria didampingi oleh guru beberapa dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Selain itu wacana-wacana seksualitas juga sudah mulai didiskusikan oleh anak-anak muda dari organisasi agama, seperti NU maupun Muhammadiyah. Bahkan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga mempunyai program khusus penanggulangan HIV dan AIDS yang mengharuskan pelibatan pada kelompok gay dan waria di beberapa provinsi di Indonesia. Konteks itulah yang pelan tapi pasti, memaksa kelompok tokoh agama NU membangun dialog terus menerus dengan kelompok gay dan waria. Melalui perjumpaan itulah satu sama lain akan saling mengenal tanpa kekerasan dan kebencian.⁵

Suara Kita sendiri banyak menggunakan

pendekatan kebudayaan dalam melakukan dialog atau advokasi hak-hak LGBT di Indonesia, misalnya melalui alat jurnalistik (tulisan), fotografi, film pendek dan penerbitan buku yang berkaitan dengan pengalaman hidup LGBT baik di Indonesia maupun dunia. Selain itu, Suara Kita juga membangun bahan-bahan kajian di perpustakaan untuk isu seksualitas dan diskusi-diskusi kritis tentang gender dan seksualitas. Kelompok-kelompok yang menjadi mitra Suara Kita, selain komunitas LGBT sendiri juga jaringan lintas sektor, seperti kelompok perempuan, aktivis HAM, aktivis HIV dan AIDS, aktivis pluralisme, tokoh agama, akademisi, media dan mahasiswa. Pengalaman selama ini, cara ini menjadi sangat efektif dalam mensosialisasikan isu seksualitas pada banyak pihak tanpa perlu membangun konflik atau kekerasan satu sama lain. Karena Suara Kita percaya bahwa gerakan sosial tidak bisa dibangun secara tunggal.

Penutup: Tantangan Gerakan LGBT

Harus diakui, reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Masih belum masuk secara formal individu LGBT ke lembaga formal. Walau upaya-upaya itu masih terus dilakukan dan selalu gagal, seperti mencoba masuk ke lembaga Komnas HAM. Tentu alasannya sangat sederhana dijelaskan, karena sistem sosial dan politik kita masih sangat homofobia sehingga peluang untuk LGBT sudah ditutup. Tetapi dari kegagalan itu, ada banyak peluang isu seksualitas dalam politik Indonesia mulai dibicarakan identitas, baik dari pihak yang mendukung maupun yang kontra. Misalnya isu-isu seksualitas, apalagi saat dibahas di UU Pornografi tahun 2000-an, isu LGBT kembali dibicarakan secara serius. Dan sampai akhirnya muncul satu pasal identitas homoseksual dalam UU Pornografi pasal 4 ayat 1 (a) bahwa homoseksual termasuk dalam persenggamaan yang menyimpang.⁶

Bukan cuma UU Pornografi, di dalam Peraturan

Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pasal 13 huruf f tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menyatakan bahwa calon orang tua angkat bukan dari pasangan sejenis.⁷ Kemudian kebijakan itu diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Sosial (PerMenSos) No. 110/HUK/2009 Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa syarat calon orang tua angkat bagi anak bukan pasangan sejenis.⁸ Walau premis logika dari kedua kebijakan tentang pengangkatan anak salah besar, karena jika ada larangan pasangan sejenis, artinya Indonesia mengakui adanya pasangan sejenis. Dari ketiga contoh kebijakan itu, walau identitas homoseksual dilihat atau diakui sebagai sesuatu yang negatif, tetapi jika dilihat dari sisi logika positif, artinya negara telah mengakui secara formal bahwa ada identitas homoseksual sebagai identitas seksual manusia di Indonesia. Bahkan mengakui adanya pasangan sejenis. Selain itu mulai muncul juga pengakuan identitas homoseksual dalam kebijakan negara dengan semangat penghormatan dan perlindungan pada identitas orientasi seksual dan identitas tertentu. Misalnya di dalam aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa: "Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan hak dan melindungi kepentingan individu/kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu".⁹

Kemudian juga Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 pasal 4 huruf h, bahwa konsep dasar perlindungan HAM; "HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab;"¹⁰ Belum lagi perdebatan dan kepanikan secara informal yang dilakukan oleh pejabat, misalnya yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, hampir setiap melakukan uji kelayakan calon pejabat publik yang berkaitan dengan HAM, misalnya calon hakim konstitusi dan calon komisioner Komnas HAM, pertanyaan tentang perkawinan sejenis selalu menjadi pertanyaan dari anggota dewan. Ada kepanikan massal seperti pada isu seksualitas. Seakan-akan anggota DPR RI Komisi III tidak ingin pejabat negara yang bekerja untuk penegakan HAM mempunyai pandangan mendukung LGBT. Itulah fakta dinamika perdebatan wacana dan pengakuan isu LGBT dalam konteks negara. Memang dalam

sebuah negara demokrasi pro kontra satu isu harus dilalui.

Seperti apa yang terjadi di Amerika bahwa perdebatan LGBT dan dialog tentang isu LGBT masih terus terjadi, bahkan sampai sekarang. Tetapi proses perdebatan itu mendorong semua pihak untuk terus memahami satu sama lain, berdialog, bertarung, pada keyakinan diri sendiri, orang lain, komunitas maupun negara. Tapi semua itulah indah proses perjuangan LGBT dalam sebuah negara demokrasi. Ada proses tarik menarik, baik yang pro maupun yang kontra. Penulis percaya, munculnya saya sebagai individu gay dan Suara Kita sebagai organisasi LGBT ikut memberikan warna dialog tentang isu LGBT dalam proses menuju Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Karena hanya dengan itulah Indonesia akan menjadi negara yang besar dan beradab tanpa diskriminasi pada siapapun sebagai warga negara. Mungkin saja, bangsa ini harus berterima kasih pada kelompok LGBT, karena bisa memberikan pelajaran bagi publik bagaimana menjadi manusia dan bangsa yang adil pada setiap warga.

Daftar Pustaka

- Arus Pelangi. http://www.oocities.org/arus_pelangi/statement/studsus_diskrim_lghti.pdf
- Departemen Agama. <http://kemenag.go.id/file/dokumen/442008.pdf>
- Departemen Keuangan <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PPP.htm>
- KPI. http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
- Komnas HAM. <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen-siaran-ers/Perkap%20No%20%208%20tahun%202009.pdf>
- Mahkamah Konstitusi.
<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/13c2611dfef3947cc7cb32031502d98b64f7fe25.pdf>
- Suara Kita. <http://www.suarakita.org>

Catatan Belakang

1. http://www.oocities.org/arus_pelangi/statement/studsus_diskrim_lghti.pdf
2. Pendapat Yanti Muchar, direktur Perkumpulan Kapal Perempuan, salah satu lembaga yang fokus membantu kasus penyiksaan yang saya alami. Tentunya masih ada pihak lain, seperti Nursyahbani Katjasungkana (pendiri LBH APIK) dan juga Dewi Candraningrum dari *Jurnal Perempuan*.
3. <http://www.suarakita.org>
4. Di New York Amerika Serikat pada Juni 1969, terjadi peristiwa kekerasan pada kelompok LGBT dari kepolisian Amerika, yang dikenal dengan tragedi Stonewall. Peristiwa itu sebagai tonggak perlawanan hak-hak LGBT di Amerika, yang sampai sekarang

terus dirayakan.

5. Di NU sendiri sudah mulai muncul tokoh agama yang secara terbuka membela kelompok LGBT, seperti Gus Dur, Prof. Siti Musdah Mulia, M.Guntur Romli, Abdul Muiz Ghazali, Kyai Husein Muhammad.
6. <http://kemenag.go.id/file/dokumen/442008.pdf>
7. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>
8. <http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/13c2611dfefd3947cc7cb32031502d98b64f7fe25.pdf>
9. http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
10. <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen-siaran-ers/Perkap%20No%208%20tahun%202009.pdf>

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / <i>"Why I founded Our Voice": a Memoir</i>	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / <i>"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta</i>	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
383-385	
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

